



Judul : Komisi X DPR soroti 700 ribu anak Papua tidak masuk sekolah
Tanggal : Senin, 22 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Komisi X DPR Soroti 700 Ribu Anak Papua Tidak Masuk Sekolah

WAKIL Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyoroti laporan dugaan sebanyak 700 ribu anak di Papua yang tidak bersekolah. Hal ini merupakan isu serius sebab berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar warga negara atas pendidikan.

"Ini tidak bisa dipandang enteng karena menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa," ujar Lalu Hadrian dalam keterangannya, Sabtu (20/12/2025).

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan adanya 700 ribu anak di wilayah Papua yang belum mendapatkan pendidikan formal di sekolah. "Itu informasi dari Bupati Manokwari (Papua)," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Presiden Prabowo, kata Tito, memberikan arahan untuk menindaklanjuti informasi tersebut. "Tadi Pak Presiden menyampaikan data ini harus kita cross-check dulu benar nggak," ucapnya. Jika ada anak asal Papua yang tidak sekolah, Pemerintah akan mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan.

Lalu Hadrian meminta data tersebut perlu dicermati dan diverifikasi secara menyeluruh agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan. Proses cross-check data sangat penting dan harus melibatkan berbagai pihak terkait. Mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Pemerintah Daerah (Pemda), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Tujuan verifikasi itu untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. "Validitas data men-

jadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran," tegas politikus PKB ini.

Terlepas dari angka pastinya, Lalu Hadrian menekankan persoalan akses pendidikan di Papua merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan. Berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, distribusi guru, hingga kondisi geografis masih menjadi hambatan utama.

"Negara wajib hadir untuk memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan," tegas legislator asal dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II itu.

Karena itu, Lalu Hadrian mendesak Pemerintah agar menjadikan temuan ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan afirmatif di sektor pendidikan di Papua. Langkah tersebut mencakup perbaikan distribusi guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemda.

Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati menambahkan, laporan mengenai 700 ribu anak tidak sekolah di Tanah Papua sebagai alarm keras atas kegagalan sistemik yang selama ini terabaikan. Laporan dari Mendagri yang berasal dari Bupati Manokwari harus dilakukan verifikasi faktual agar menemukan realitas di lapangan. "Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, tapi hak konstitusionalnya terabaikan," ujarnya.

Persoalan ini, lanjutnya, berakar pada ketidaksinkronan data yang akut. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan progres Data Pokok Pendidikan (Dapodik), masih terdapat disparitas Angka Partisipasi Murni (APM) yang mencolok antara wilayah perkotaan dan pegunungan di Papua. ■ TIF